



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Singaraja, Desember 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, ⁶



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/urusan sosial pada Dinas Sosial sebagaimana ditetapkan Penetapan Kinerja tahun 2021.

Penetapan kinerja memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2017-2022 dan Rencana Kerja tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain :

1. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dunia usaha.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah :

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin kompleks.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
B. REALISASI ANGGARAN	22
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL TAHUN 2021	
2. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021	
3. CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG	
4. PENGHARGAAN YANG DIMILIKI OLEH PERANGKAT DAERAH	

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok :

”Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial” yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

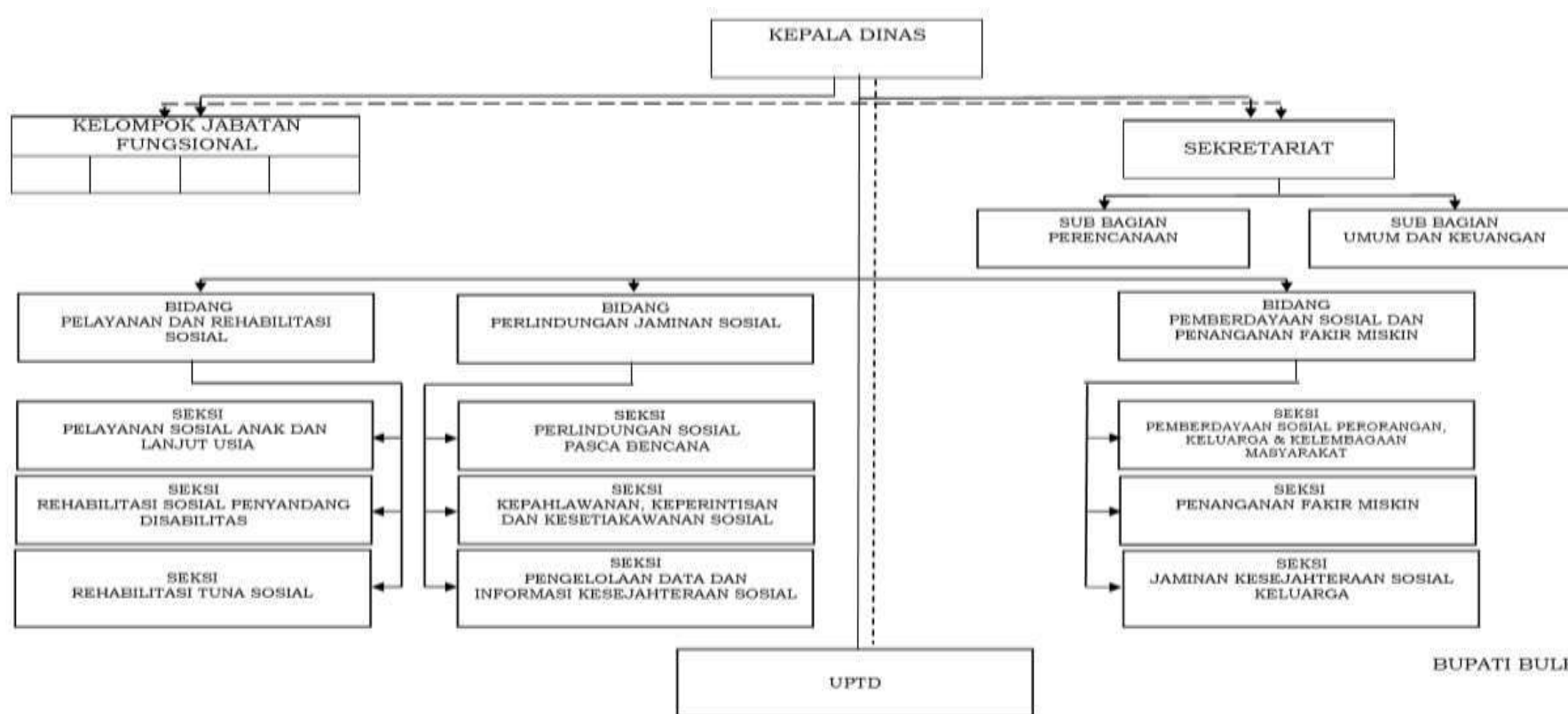
B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdiri atas :

1. Kepala Dinas (Eselon II/b)
2. Sekretaris (Eselon III/a) , dibantu 2 Sub Bagian:
 - a. Sub. Bagian Perencanaan (Eselon IV/a)
 - b. Sub. Bagian Umum dan Keuangan (Eselon IV/a)
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Eselon IV/a)
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi:
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial (Eselon IV/a)
5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Eselon III/b) 1, dibantu 3 Seksi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca bencana (Eselon IV/a)
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Eselon IV/a)
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (Eselon IV/a)
6. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/a), dibantu:
 - a. Kepala Tata Usaha UPT Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/b)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENLATUR
JABATAN DINAS SOSIAL TIPE B.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

C. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD:

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian SDGs dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial / Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan, untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya .

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruh wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait .

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan

- kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
 - e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
 - f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017-2022, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan sosial yang menjadi Urusan Sosial yang ada di Kabupaten Buleleng.

Adapun Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif“, dengan sasaran strategis pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase PMKS yang tertangani, dengan target: 5,20%
 - b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial: 19,30%

Namun dari hasil reviu pohon kinerja maka sasaran strategis pada dinas sosial mengalami perubahan, sasaran strategis pada Dinas Sosial tahun 2021, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan target: 0,63%
2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif., dengan target: 80%

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan				
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output						
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9				
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	1.238.761.000	Jumlah dokumen Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Jumlah PMKS yang diberikan bantuan, Jumlah SDM Desa/ Kelurahan yang dilatih	Jumlah PMKS penerima sembako, Jumlah fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	710.088.000				
								Jumlah dokumen jaminan sosial dan bantuan sosial, Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial		528.673.000			
				Program rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	2.416.518.000	Jumlah dokumen anak terlantar, lansia terlantar, anak nakal yang tersedia,	jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	808.092.000				
								Jumlah dokumen penyandang disabilitas, Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan, Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma		765.325.000			
									Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bantuan, Jumlah anak nakal, anak terlantar yang dilatih	jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan praktek belajar kerja	310.096.000	533.005.000		
									Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial				
									Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	341.401.000	Tersedianya data tuna sosial	jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	121.786.000	

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
							Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	192.995.000	
							Terlaksananya pelatihan PMKS	jumlah pemberdayaan eks. Penyandang penyakit sosial	26.620.000	
			Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	39.930.000	jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	39.930.000	
			Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	399.300.000	Jumlah dokumen penduduk miskin, Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapat pelatihan SIK-NG	Jumlah pemutakhiran data penduduk miskin	399.300.000	
			Program Penanganan bencana	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	254.545.000	Jumlah dokumen penanganan bencana dan kejadian luar biasa, Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana, Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan	Jumlah penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	254.545.000	
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80%	Program Penanganan bencana	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	5.000.000	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan kebencanaan	jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	5.000.000	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	778.191.000	Jumlah dokumen PSKS, KT, TKSK, WKSBM, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	jumlah sdm kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	208.100.000	
							Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	jumlah panti asuhan yang mendapat bantuan, jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	570.091.000	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80,00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 964.349.000	APBD II
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 952.412.150	APBD II
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 175.129.780	APBD II
4	Program Penanganan Bencana	Rp 319.497.360	APBD II
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 816.230.670	APBD II

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	a. Persentase PMKS yang tertangani b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

		2. Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
--	--	--	---

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi :

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100%	: Sangat berhasil
Capaian kinerja >70 sd <85%	: Berhasil
Capaian kinerja >55 sd <70%	: Cukup berhasil
Capaian kinerja < 55 sd 0%	: Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021:

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2021 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase PMKS yang tertangani	5,20	3,86	74,24

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	19,30	3,62	18,73

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021, rata-rata capaian dari ke dua indikator sasaran tersebut adalah 46,49% dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat **tidak berhasil**. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	CAPAIAN IKU
1.	Persentase PMKS yang tertangani	$= \frac{\sum PMKS \text{ yang tertangani}}{\sum PMKS \text{ yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{1.655}{42.869} \times 100\%$ $= 3,86 \%$
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$= \frac{\sum PMKS \text{ yang diberikan bantuan}}{\sum PMKS \text{ yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$ $= \frac{1.550}{42.869} \times 100\%$ $= 3,62 \%$

Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021, dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63	3,62	574,60
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	100

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021, rata-rata capaian dari ke dua indikator sasaran tersebut adalah 337,3% dengan skala kriteria diperoleh dengan predikat **sangat berhasil**. Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	URAIAN	CAPAIAN
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$= \frac{\sum \text{PMKS penerima bantuan sosial}}{\sum \text{Jumlah PMKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $= \frac{1.550}{42.869} \times 100\%$ $= 3,62\%$
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	$= \frac{\sum \text{PSKS yang aktif}}{\sum \text{Jumlah PSKS Tahun sekarang}} \times 100\%$ $= \frac{218}{272} \times 100\%$ $= 80 \%$

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, untuk capaian realisasi tahun 2020 – 2021 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian 2020	Realisasi Capaian 2021
1.	Persentase PMKS yang tertangani	159 %	74,24%
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	38%	18,73%

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2020-2021, maka rata-rata capaian kinerja dan realisasi kinerja 98.50% sampai 46,49% yaitu pada tahun 2020 sesuai target yang telah ditentukan, sedangkan tahun 2021 tidak sesuai dengan target yang ditentukan hal ini dikarenakan target pada tahun 2021 lebih besar daripada PMKS yang tertangani dan memperoleh bantuan sosial.

Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021, untuk capaian realisasi tahun 2020 – 2021 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian 2020	Realisasi Capaian 2021
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	36,51 %	574,60 %
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100 %	100 %

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2020-2021, maka rata-rata capaian kinerja dan realisasi kinerja 68,25% sampai 337,3% yaitu pada tahun 2020 realisasi kinerjanya kurang dari target yang di tentukan sedangkan tahun 2021 realisasi kinerja melebihi target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin meliputi 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 46,49%, dengan predikat **Tidak Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Prosentase PMKS yang tertangani	7.31	5.20	3,86	74,24	5,80
2.	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6.84	19.30	3,62	18,73	20,50

a. Persentase PMKS yang tertangani

Realisasi pencapaian Persentase PMKS yang tertangani sebesar 3,86%, diperoleh dari jumlah PMKS yang tertangani (1.655 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada (42,869 Orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 74,24%.

Jumlah PMKS yang tertangani sebesar 1.655 orang di dapatkan dari pemberian sembako isidentil kepada Fakir Miskin sebesar 250 orang, bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bibit babi kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 8 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau 80 orang (setiap kelompok terdiri dari 10 orang), bantuan sosial kepada Lanjut Usia berupa sembako isidentil sebanyak 180 orang, bibit babi sebanyak 15 orang, bantuan sosial uang sebanyak 100 orang, bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas berupa alat bantu sebanyak 18 orang (kursi roda 14 orang, tongkat ketiak 2 orang, alat bantu dengar 2 orang), sembako isidentil sebanyak 100 orang, bibit babi sebanyak 30 orang, bantuan sosial uang sebanyak 100 orang, bantuan sosial kepada anak terlantar berupa sembako isidentil sebanyak 67 anak, bibit babi sebanyak 10 anak, bantuan sosial untuk

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) berupa sembako sebanyak 40 orang, bantuan sosial berupa bibit babi kepada Eks Napi sebanyak 10 orang, penanganan gelandangan dan pengemis sebanyak 100 orang, bantuan buffer stock bencana sebanyak 550 orang untuk penanganan pasca bencana dan penguburan mayat terlantar sebanyak 5 orang

b. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Realisasi pencapaian Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 3,62% diperoleh dari jumlah PMKS yang diberikan bantuan (1.550 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (42.869 orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 18,73%.

Jumlah PMKS yang tertangani sebesar 1.550 orang di dapatkan dari pemberian sembako isidentil kepada Fakir Miskin sebesar 250 orang, bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bibit babi kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 8 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau 80 orang (setiap kelompok terdiri dari 10 orang), bantuan sosial kepada Lanjut Usia berupa sembako isidentil sebanyak 180 orang, bibit babi sebanyak 15 orang, bantuan sosial uang sebanyak 100 orang, bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas berupa alat bantu sebanyak 18 orang (kursi roda 14 orang, tongkat ketiak 2 orang, alat bantu dengar 2 orang), sembako isidentil sebanyak 100 orang, bibit babi sebanyak 30 orang, bantuan sosial uang sebanyak 100 orang, bantuan sosial kepada anak terlantar berupa sembako isidentil sebanyak 67 anak, bibit babi sebanyak 10 anak, bantuan sosial untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) berupa sembako sebanyak 40 orang, bantuan sosial berupa bibit babi kepada Eks Napi sebanyak 10 orang, dan bantuan buffer stock bencana sebanyak 550 orang untuk penanganan pasca bencana.

Analisis capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021

Sasaran “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 574,60%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,23	0,63	3,62	574,60%	0,63%

a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Realisasi pencapaian Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 3,62%, diperoleh dari jumlah PMKS penerima bantuan sosial (1.550 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS tahun sekarang (42.869 Orang) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 574,60%.

Jumlah PMKS penerima bantuan sosial 1.550 orang diperoleh dari realisasi program / kegiatan / subkegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu: pemberian sembako isidentil kepada Fakir Miskin sebesar 250 orang, bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bibit babi kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 8 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) atau 80 orang (setiap kelompok terdiri dari 10 orang), bantuan sosial kepada Lanjut Usia berupa sembako isidentil sebanyak 180 orang, bibit babi sebanyak 15 orang, bantuan sosial uang sebanyak 100 orang, bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas berupa alat bantu sebanyak 18 orang (kursi roda 14 orang, tongkat ketiak 2 orang, alat bantu dengar 2 orang), sembako isidentil sebanyak 100 orang, bibit babi sebanyak 30 orang, bantuan sosial uang sebanyak 100 orang, bantuan sosial kepada anak terlantar berupa sembako isidentil sebanyak 67 anak, bibit babi sebanyak 10 anak, bantuan sosial untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) berupa sembako

sebanyak 40 orang, bantuan sosial berupa bibit babi kepada Eks Napi sebanyak 10 orang, dan bantuan buffer stock bencana sebanyak 550 orang untuk penanganan pasca bencana.

Sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			Target 2022
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	80	80	100%	80

a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Realisasi pencapaian Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif sebesar 80%, diperoleh dari jumlah PSKS yang aktif (218) dibandingkan dengan jumlah PSKS tahun sekarang (272) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut:

1. Program pemberdayaan sosial
2. Program rehabilitasi sosial
3. Program perlindungan dan jaminan sosial
4. Program penanganan bencana
5. Program pengelolaan taman makam pahlawan

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
 - a. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
 - b. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dunia usaha.
 - c. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, Corporate Social Responsibility (CSR) Dunia Usaha, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
 - d. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :
 - a. Belum Validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - b. Belum maksimalnya Desa / Kelurahan dalam melaksanakan musdes/muskel
 - c. Terbatasnya sumberdaya pelaksana kegiatan penanganan PMKS.
 - d. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan PMKS.
 - e. Target yang di cantumkan dalam Renstra terlalu tinggi dan adanya pengurangan anggaran karena Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi realisasi dalam pencapaian target tersebut.
- Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya/ alternative yang dilakukan antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data ke Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan musdes/muskel untuk perbaikan data DTKS
 - b. Mengoptimalkan kinerja sumberdaya pelaksana dan meningkatkan kerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
 - c. Bekerjasama dengan pihak ketiga (CSR) dalam menangani PMKS

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian Kinerja Organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang ada terdiri dari 28 orang tenaga PNS dan dibantu 106 orang tenaga kontrak kerja sebagai tenaga administrasi pada kegiatan dan tenaga cleaning service, tukang kebon, serta sopir. Tenaga kontrak kerja sebanyak 39 orang bertugas di Monumen/Tugu Perjuangan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial antara lain: Monumen Jagaraga, Taman Makam Pahlawan “Curastana”, Monumen Tri Yudha Sakti, Monumen Ayodya Pura di Selat, Monumen Bhuana Kertha, Tugu Perjuangan Wira Bhuana di Gitgit.
- b. Kurangnya tenaga yang memiliki pendidikan pekerjaan sosial khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial yang membutuhkan teori social worker.

6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja.

Dari 5 Program Wajib, 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, pada dasarnya secara keseluruhan telah mendukung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Namun ada kegiatan yang secara kuantitatif belum tercapai realisasi target fisiknya 100% yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan Makanan ini disebabkan karena target penguburan mayat terlantar sebanyak 8 orang namun jumlah kasus mayat terlantar hanya ada 5 orang sehingga terjadi penurunan capaian target fisik untuk kasus - kasus keterlantaran hal ini menandakan bahwa kondisi di Kabupaten Buleleng cukup aman terhadap kasus- kasus keterlantaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dari sasaran strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
I	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Program Pemberdayaan Sosial	964.349.000	958.342.285	99,38
		Program rehabilitasi sosial	952.412.150	924.352.435	97,05
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	175.129.780	170.122.688	97,14
		Program Penanganan bencana	319.497.360	297.946.508	93,25
II	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Program Pemberdayaan Sosial	964.349.000	958.342.285	99,38
		Program Penanganan bencana	319.497.360	297.946.508	93,25

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yakni ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”***.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar hasil program, kegiatan dan keluaran sub kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.

Lampiran 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL
TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya efektifitas Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>a. Cara Pengukuran: (Jumlah PMKS tahun sebelumnya dikurangi jumlah PMKS tahun sekarang) di bagi jumlah PMKS tahun sebelumnya di kalikan 100%</p> <p>b. Tipe penghitungan : Mandiri per tahun</p> <p>c. Sumber data : Dinas Sosial</p> <p>d. Alasan: Sesuai Dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor: 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial 2. Permensos : 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Putu Agus Suradnyana, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 29 Oktober 2021

PIHAK KEDUA,

Putu Agus Suradnyana, ST

PIHAK PERTAMA,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 964.349.000	APBD II
2 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 952.412.150	APBD II
3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 175.129.780	APBD II
4 Program Penanganan Bencana	Rp 319.497.360	APBD II
5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 816.230.670	APBD II

Singaraja, 29 Oktober 2021

Bupati Buleleng,

Putu Agus Suradnyana, ST

Kepala Dinas Sosial,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)									
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	0,63	Januari	-	-	-		Program Pemberdayaan Sosial	964.349.000	Januari	31.454.583	0	0,00	- Karena adanya pandemi covid-19 dengan sistem kerja yang tidak optimal menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru yang menyebabkan lambatnya realisasi kinerja OPD			
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	84.960.027	0	0,00				
					Maret	-	-	-				Maret	157.467.001	53.635.450	34,06				
					April	-	-	-				April	274.561.792	78.645.690	28,64				
					Mei	-	-	-				Mei	351.185.176	182.947.010	52,09				
					Juni	0,15	0,00	0,00	- Karena adanya pandemi covid-19 berpengaruh tidak adanya realisasi pada sasaran ini karena bantuan PMKS yang seharusnya berupa KUBE/UEP sementara difokuskan pada pemberian sembako dan perubahan harga bibit babi sehingga menunggu perubahan anggaran			Juni	418.532.648	262.538.090	62,73				
					Juli	-	-	-				Juli	527.886.360	308.148.330	58,37				
					Agustus	-	-	-				Agustus	585.023.832	344.022.770	58,80				
					September	0,30	0,00	0,00				September	713.782.124	384.303.010	53,84				
					Oktober	-	-	-				Oktober	880.027.416	561.778.568	63,84				
					Nopember	0,63	3,62	574,60	- Karena adanya pandemi covid-19 berpengaruh realisasi pada sasaran ini karena bantuan PMKS berupa sembako termasuk mengujudkan kemandirian PMKS dalam jangka pendek dan bantuan KUBE/UEP untuk Jangka Panjangnya			Nopember	921.513.208	707.080.020	76,73				
					Desember	-	-	-				Desember	964.349.000	958.342.285	99,38				
					Januari							Program Rehabilitasi Sosial	952.412.150	Januari	41.063.896		0	0,00	- Karena adanya pandemi covid-19 dengan sistem kerja yang tidak optimal menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru yang menyebabkan lambatnya realisasi kinerja OPD
					Pebruari									Pebruari	117.556.415		0	0,00	
					Maret									Maret	161.727.959		40.400.000	24,98	
					April									April	233.247.689		63.030.320	27,02	
					Mei									Mei	306.705.127		155.275.955	50,63	
					Juni									Juni	385.558.440		197.631.395	51,26	
					Juli									Juli	493.532.753		246.779.735	50,00	
					Agustus									Agustus	538.546.766		271.232.825	50,36	
September					September	578.368.599	315.436.715	54,54											
Oktober					Oktober	898.684.667	532.001.175	59,20											
Nopember					Nopember	930.652.304	734.540.118	78,93											
Desember					Desember	952.412.150	924.352.435	97,05											
Januari					Program Penanganan Bencana	319.497.360	Januari	12.372.181	0	0,00	- Karena adanya pandemi covid-19 dengan sistem kerja yang tidak optimal menyebabkan								
Pebruari							Pebruari	106.724.125	0	0,00									
Maret							Maret	120.285.681	20.900.000	17,38									

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	%	80	Januari	80	80	100,00	- Dari PSKS yang ada terdapat 80% PSKS yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan sosial pada setiap bulannya	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	175.129.780	April	156.371.710	32.066.800	20,51	- Karena adanya pandemi covid-19 dengan sistem kerja yang tidak optimal menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru yang menyebabkan lambatnya realisasi kinerja OPD	
					Mei	169.133.075	57.190.455	33,81									
					Juni	182.834.440	133.000.795	72,74									
					Juli	220.085.805	144.167.595	65,51									
					Agustus	231.347.170	156.802.145	67,78									
					September	244.568.535	169.718.945	69,40									
					Oktober	256.159.900	184.084.245	71,86									
					Nopember	313.644.665	213.404.713	68,04									
					Desember	319.497.360	297.946.508	93,25									
					Januari	8.585.189	0	0,00									
					Pebruari	21.914.888	0	0,00									
					Maret	42.180.077	10.800.000	25,60									
					April	72.332.668	18.143.340	25,08									
					Mei	83.919.587	45.724.780	54,49									
					Juni	94.182.016	69.321.780	73,60									
					Juli	124.885.965	80.165.120	64,19									
					Agustus	134.452.584	87.508.460	65,08									
					September	146.039.503	114.831.800	78,63									
					Oktober	157.739.792	132.105.540	83,75									
					Nopember	169.002.711	151.818.574	89,83									
					Desember	175.129.780	170.122.688	97,14									
					Januari	12.372.181	0	0,00		Program Penanganan Bencana	319.497.360	Januari	12.372.181	0	0,00		- Karena adanya pandemi covid-19 dengan sistem kerja yang tidak optimal menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru yang menyebabkan lambatnya realisasi kinerja OPD
					Pebruari	106.724.125	0	0,00									
					Maret	120.285.681	20.900.000	15,26									
April	156.371.710	32.066.800	20,51														
Mei	169.133.075	57.190.455	33,81														
Juni	182.834.440	133.000.795	72,74														
Juli	220.085.805	144.167.595	65,51														
Agustus	231.347.170	156.802.145	67,78														
September	244.568.535	169.718.945	69,40														
Oktober	256.159.900	184.084.245	71,86														
Nopember	313.644.665	213.404.713	68,04														
Desember	319.497.360	297.946.508	93,25														

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulanan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Program Pemberdayaan Sosial	964.349.000	Januari	31.454.583	0	0,00	- Karena adanya pandemi covid-19 dengan sistem kerja yang tidak optimal menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang sudah direncanakan - Karena adanya sistem penganggaran dan keuangan yang baru yang menyebabkan lambatnya realisasi kinerja OPD
											Pebruari	84.960.027	0	0,00		
											Maret	157.467.001	53.635.450	34,06		
											April	274.561.792	78.645.690	28,64		
											Mei	351.185.176	182.947.010	52,09		
											Juni	418.532.648	262.538.090	62,73		
											Juli	527.886.360	308.148.330	58,37		
											Agustus	585.023.832	344.022.770	58,80		
											September	713.782.124	384.303.010	53,84		
											Oktober	880.027.416	561.778.568	63,84		
											Nopember	921.513.208	713.605.212	77,44		
											Desember	964.349.000	958.342.285	99,38		

Sungarya, Desember 2021
Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Pembina Tk.I (1/b)
NIP.196912311991031053

PENGHARGAAN YANG DIMILIKI OLEH PERANGKAT DAERAH

1. Juara II Dan Harapan II Lomba Utsawa Dharma Gita Bagi Penyandang Disabilitas Se-Bali Dalam Rangka Merayakan Hari Disabilitas Internasional Yang Deselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Klungkung.

